

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu :

Wujud perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia bidang Penata Laksana Rumah Tangga dalam Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi meliputi :

1. Perlindungan hukum preventif yang tertuang dalam pasal
  - a. Pasal 2 huruf a dan pasal 3 huruf a yaitu mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan membuat komite kerja bersama guna memastikan pelaksanaan dari semua ketentuan yang ada dalam kontrak demi menjamin perlindungan yang efektif dan setara terhadap TKI sektor domestik.
  - b. Pasal 2 huruf c yaitu memastikan semua perekrutan TKI sektor domestik dilakukan oleh kantor-kantor perekrutan, perusahaan atau agensi yang memiliki izin sebagai pencegahan adanya TKI ilegal.
  - c. Pasal 3 huruf b yaitu memastikan TKI memegang sendiri segala dokumen pribadinya agar majikan tidak dapat menahan TKI apabila kontraknya sudah selesai.
  - d. Pasal 3 huruf c yaitu menerbitkan kartu identitas yang sah setelah kedatangan TKI agar TKI terdata dan menghindari adanya TKI ilegal.
  - e. Pasal 3 huruf d yaitu mensyaratkan para majikan untuk menyediakan skema asuransi sebagai perlindungan preventif terhadap TKI untuk mendapatkan jaminan sosial.

- f. Pasal 3 huruf e yaitu memfasilitasi pembukuan rekening bank sebagai fasilitas kepada TKI untuk menyimpan pendapatannya agar pemerintah bisa mengetahui pemasukan setiap bulannya, hal ini juga sebagai tindakan untuk memantau majikan untuk tetap melaksanakan kewajibannya dalam membayar upah.
2. Perlindungan hukum represif yang tertuang dalam pasal
    - a. Pasal 2 huruf f yaitu membentuk suatu skema yang akan menyediakan bantuan selama 24 jam sebagai perlindungan represif ketika TKI ingin memberikan pengaduan atas segala sesuatu yang menimpanya.
    - b. Pasal 3 huruf g yaitu memfasilitasi pelaksanaan perlindungan dan bantuan kekonsuleran oleh misi diplomatik atau konsuler Indonesia dengan memberikan informasi tentang TKI yang ditahan atau dipenjara merupakan wujud perlindungan hukum represif dalam melakukan upaya pembebasan terhadap TKI yang ditahan sesuai hukum yang berlaku.
    - c. Pasal 3 huruf h yaitu memfasilitasi TKI dalam penyelesaian kontrak, keadaan darurat atau sesuai dengan kebutuhan termasuk penerbitan visa keluar sebagai perlindungan represif untuk mempermudah kepulangan TKI.

## **B. Saran**

### **1. Bagi negara pengirim**

Indonesia selaku negara pengirim diharapkan lebih serius dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap TKI bidang Penata Laksana Rumah Tangga salah satunya dengan cara meningkatkan pelatihan kerja serta pengetahuan tentang budaya, adat dan praktik sosial di Arab Saudi sebagai

wujud perlindungan dalam menjamin perlindungan hukum terhadap TKI di Arab Saudi khususnya yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga.

2. Bagi negara penerima

Mengingat bahwa pengawasan dibebankan kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi maka seyogyanya sistem pengawasan yang dilakukan harus lebih ditingkatkan lagi sebagai langkah preventif, selain itu Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga harus memenuhi segala kewajiban yang tertuang dalam agreement agar perlindungan hukum bagi TKI yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga dapat terwujud.